

Konflik politik kemajemukan vertikal Adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal ini dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki tau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut.² Untuk memahami konflik, Dahrendorf mengemukakan pandangannya tentang konflik yang selalu melekat dalam realitas sosial:

- a. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam keadaan proses perubahan yang tidak pernah berakhir.
- b. Setiap masyarakat selalu memperlihatkan konflik pada setiap kehidupan sosial.
- c. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya.
- d. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.³

Di sini, Dahrendorf mencoba untuk menggambarkan suatu rentang kehidupan sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Konflik ini akan menyertai kehidupan manusia dalam setiap perilakunya. Dengan asumsi manusia yang terlibat konflik dalam waktu yang tertentu, setelah mampu menyelesaikannya akan muncul kembali konflik yang berbeda dari keadaan semula. Dan pendekatan konflik dapat digunakan jika kondisi yang

² Ibid, 152-153

³ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 196-198.

sepertinya sangat mustahil sebuah kelompok mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan tersebut.⁶ Sekalipun pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan. Masyarakat dan hubungannya dengan kelompok juga dapat dikaitkan dengan ekspresi budaya yang kemudian terwujudkan dalam masyarakat sipil madanilah atau yang sering disebut dengan konsep *civil society*, yang dalam konteks Indonesia sesungguhnya sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban (di desa-desa) yang dominan di masa lalu, ketika kelompok masyarakat berkedudukan sama dan mengatur kehidupan bersama secara bermusyawarah.⁷

Menurut Arthur F. Bentley didefinisikan sebagai suatu porsi manusia tertentu dalam suatu masyarakat, yang diambil bukan sebagai suatu massa tindakan yang tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam aktivitas kelompok-kelompok lain. Karenanya kelompok lebih mewakili proses daripada sesuatu yang statis.⁸ Dalam dinamika kelompok, apalagi yang berkaitan dengan politik maka akan selalu terkait dengan apa yang disebut sebagai kepentingan, baik itu menyangkut hal-hal individu maupun yang dilandasi semangat kebersamaan kelompok sebagai entitas bersama yang memiliki tujuan-tujuan kelompok yang sepakat untuk diperjuangkan dan direalisasikan. Kepentingan, menurut Bentley adalah perilaku yang dihadapi menyangkut suatu tuntutan atau tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok tertentu dalam suatu sistem sosial. Dalam hal ini,

⁶ Varma S.P, *Teori Politik Modern*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,1987), 226

⁷ Miftah Thoha, *Birokrasi dan POLitik di Indonesia*, (Jakarta:, 2003), 55

⁸ Varma S.P, *Teori Politik Modern*, 227

